

REPRESENTASI PEREMPUAN BERPOLITIK DALAM FILM TILIK THE SERIES

Millah Hanifah¹. Hapsari Dwiningtyas²

millahhanifah1@gmail.com

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465407

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

*Women in film media are often depicted as subordinate figures fulfilling domestic and reproductive functions within the private sphere in patriarchal societies. This research then examines the film *Tilik the Series* (2023) as a film that provides a different portrayal of women by raising the issue of women's involvement in the public sphere, specifically the political sphere dominated by men and closely related to the practice of political masculinity regarding the position of *Tilik the Series* in representing women in politics, whether represented in the form of women's power or the presence of masculine ideology practices.*

*This research using a various theories, such as Representation Theory, Standpoint Theory, Feminist Film Theory, and Leadership Style Theory. It also uses qualitative descriptive research methods and semiotic analysis of John Fiske's *The Codes of Television*, which divides each scene into levels of reality, representation, and ideology to examine the position of Film *Tilik the Series* in representing women in politics.*

The results obtained from this research indicate that women in politics use social capital as their main asset to engage in political activities through social relations. Women also adopt a leadership style that incorporates masculine traits as a form of humor and empowerment, and there is a domestication of women within the stereotype of women in politics. This research can be developed in greater depth with a different perspective.

Keywords: Representation, Semiotics, Media, Women, Politics.

ABSTRAK

Perempuan dalam media film seringkali ditampilkan sebagai figur subordinasi yang berperan memenuhi fungsi domestik dan reproduksi yang berada dalam ranah *privat* pada masyarakat dengan budaya patriarki. Penelitian ini kemudian melihat Film *Tilik the Series* (2023) sebagai film yang memberikan penggambaran berbeda mengenai perempuan dengan mengangkat isu keterlibatan perempuan dalam ranah publik, yaitu ranah politik yang didominasi oleh laki-laki dan berkaitan erat dengan praktik maskulinitas politik mengenai bagaimana posisi film *Tilik the Series* dalam merepresentasikan perempuan berpolitik, apakah direpresentasikan dalam bentuk kekuasaan perempuan atau terdapat praktik ideologi maskulinitas.

Penelitian ini menggunakan beragam teori seperti teori Representasi, Standpoint Theory, Feminist Film Theory, dan Leadership Style Theory serta menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan analisis teori semiotika *The Codes of Television* oleh John Fiske yang membagi tiap adegan pada level realitas, representasi, dan ideologi untuk melihat posisi Film *Tilik the Series* dalam merepresentasikan perempuan berpolitik.

Hasil dari penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu perempuan berpolitik menjadikan modal sosial sebagai modal utama untuk terlibat dalam kegiatan politik melalui relasi sosial, perempuan juga menggunakan gaya kepemimpinan dengan mengadopsi gaya maskulin sebagai bentuk humor dan pemberdayaan, serta terdapat *domestifikasi perempuan* pada stereotip perempuan berpolitik. Penelitian ini selanjutnya dapat dikembangkan lebih dalam dengan perspektif yang berbeda.

Kata Kunci : Representasi, Semiotika, Media, Perempuan, Politik.

PENDAHULUAN

Film memiliki unsur kedekatan dengan khalayak luas karena seringkali menampilkan isu atau permasalahan yang ada dalam kehidupan sosial budaya masyarakat sekitar, bagaimana kelompok yang berbeda dipersepsikan dan dipahami oleh masyarakat umum secara positif atau negatif berdasarkan latar belakang budaya yang ada. Salah satu isu atau permasalahan yang seringkali ditayangkan dalam media massa film yaitu mengenai diskriminasi gender terhadap perempuan.

Film yang membahas mengenai perempuan seringkali menggambarkan perempuan dengan stereotip yang lemah, tidak rasional, perempuan yang suka menggoda, sedangkan laki-laki digambarkan dengan stereotip sosok yang kuat, rasional, dan dominan (Dayanti, 2011). Penggambaran perempuan sebagai sosok yang lemah dalam film tersebut tidak terlepas dari konstruksi gender di tengah masyarakat dengan budaya patriarki.

Budaya patriarki membatasi ruang gerak perempuan di mana perempuan dianggap hanya dapat bergerak di dalam ranah domestik mengurus rumah tangga, sedangkan ranah publik merupakan ruang atau wilayah laki-laki yang berisikan permasalahan kekuasaan di mana perempuan dianggap tidak kompatibel dalam permasalahan tersebut. Perempuan dianggap tidak mampu menjadi pemimpin,

pelindung, pencari nafkah, dan melaksanakan tugas besar di sektor publik, serta tidak mampu berpartisipasi dalam pembangunan negara (Gita Murniasih et al., 2018).



Gambar 1.1 Data WEF mengenai Indeks Ketimpangan Gender di Indonesia Tahun 2024

Berdasarkan pada hasil data World Economic Forum (WEF) mengenai Indeks Ketimpangan Gender pada tahun 2024, bidang politik menjadi bidang di Indonesia yang memiliki skor indeks ketimpangan gender yang lebar dengan skor 0,138 yang jauh dari skor kesetaraan gender pada rentang 1 ke atas dan berada pada peringkat 107 dari 146 negara.

Indeks ketimpangan gender Negara Republik Indonesia yang menempati peringkat rendah dalam bidang politik ini membuktikan bahwa Negara Republik Indonesia belum mampu memberikan ruang aman dan hak yang sama bagi perempuan untuk dapat ikut serta dalam kegiatan politik. Padahal dalam hukum nasional dan internasional konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita atau CEDAW (The Convention on the

Elimination of All Forms of Discrimination against Women) yang disahkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1970 dan diratifikasi pada tahun 1987 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, perempuan memiliki berbagai hak untuk berpartisipasi dalam politik, yaitu hak untuk memperoleh jaminan memilih dan dipilih, hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah, hak untuk memiliki posisi atau jabatan dalam pemerintahan, hak untuk berpartisipasi dalam organisasi dan perkumpulan, serta memiliki jaminan untuk melakukan perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan masyarakat dan politik.

Film yang disutradarai oleh Wahyu Agung Prasetyo ini merepresentasikan realitas sosial mengenai bagaimana kondisi dan permasalahan yang harus dihadapi perempuan untuk dapat ikut serta berpartisipasi dalam kontestasi politik. Bu Tejo atau Bu Asriningtyas yang diperankan oleh Siti Fauziah dalam film ini diceritakan hendak mencalonkan lurah di mana ia harus berhadapan dengan lawan politiknya Suhartono yang diperankan oleh Seteng Sutardja. Berbagai permasalahan internal dan eksternal harus dihadapi oleh Bu Tejo untuk memenangkan kontestasi politik ini. Dari permasalahan peran ganda sebagai ibu dan calon kepala daerah hingga Bu Tejo

harus dihadapkan dengan ideologi maskulinitas politik.

Maskulinitas dan politik dianggap saling berkaitan sebagai domain yang dapat menggerakkan roda politik internasional dan hanya dimiliki oleh laki-laki. Sifat kekerasan, keberanian, kekuasaan, kemandirian, dan kekuatan fisik sudah sangat lama mempengaruhi politik internasional dalam tatanan politik global yang diproyeksikan dalam tingkah laku atau kebijakan dalam pembuatan keputusan atau *decision making process* yang cenderung merefleksikan maskulinitas dengan instrumen kekerasan (Muryantini et al., 2020). Praktik ideologi maskulinitas politik ini mengakibatkan adanya pandangan bahwa perempuan tidak layak dan memiliki kemampuan dalam menjalankan bidang politik.

Praktik kekuasaan maskulinitas politik oleh laki-laki diperlihatkan oleh tokoh Suhartono yang memiliki ambisi untuk menjadi lurah. Suhartono menganggap bahwa laki-laki memiliki nilai lebih daripada perempuan dan memiliki kekuasaan atas perempuan. Sosok perempuan dianggap sebagai individu yang sulit melaksanakan tugas kepemimpinan karena perempuan merupakan sosok yang lemah.

Meskipun film *Tilik the Series* masih menggambarkan figur perempuan sebagai figur yang suka bergosip dan cerewet,

namun film ini juga menunjukkan kekuasaan perempuan yang perhatian, telaten, dan dapat melakukan apa saja untuk kepentingan lingkungan dan masyarakat. Dibandingkan berfokus untuk menjatuhkan lawan, pemimpin perempuan dalam film ini digambarkan lebih fokus dalam mengkomunikasikan agenda politiknya kepada warga dan membuat kebijakan yang tidak hanya berpihak kepada laki-laki.

Perbedaan kekuasaan yang dimiliki oleh perempuan (*women power*) dan kekuasaan yang dimiliki oleh laki-laki terletak pada konsep feminin yang dimiliki oleh perempuan. Perempuan memiliki rasa kasih sayang dan tanggap terhadap kebutuhan orang lain sebagai agenda politiknya, sedangkan laki-laki seringkali menggunakan intrik politik yang berpusat pada dirinya sendiri. Selain itu, kekuasaan pada perempuan memperhatikan konsep pemberdayaan yang sebelumnya dimaknai sebagai sarana menginjak orang lain untuk memperoleh kekuasaan.

Intuisi dan empati yang dimiliki oleh perempuan juga menjadi salah satu kekuatan perempuan yang mengharuskan perempuan untuk berpartisipasi dalam politik karena berdasarkan Eagly & Carli (2003), perempuan lebih *interpersonally oriented* yang didukung oleh pernyataan Agustiana (2021) bahwa perempuan memiliki kecerdasan emosional untuk membangun relasi dengan pihak yang

dipimpinnya. Selain itu, perempuan dibutuhkan untuk membuat kebijakan yang adil dan dapat menyuarakan isu gender dengan mempertimbangkan sudut pandang perempuan.

Ketertarikan peneliti dalam kisah Bu Tejo dan para tokoh perempuan yang ikut serta dalam kontestasi politik dengan adanya praktik kekuasaan dan ideologi maskulinitas politik membuat peneliti tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul, “Representasi Perempuan Berpolitik dalam Film *Tilik the Series*” untuk mengetahui bagaimana posisi film *Tilik the Series* merepresentasikan perempuan berpolitik.

TUJUAN PENELITIAN

Untuk memahami pemaknaan perempuan berpolitik melalui simbol dan tanda yang direpresentasikan dan diposisikan pada Film *Tilik the Series* dengan bentuk kekuasaan perempuan atau masih terdapat praktik ideologi maskulinitas politik.

KERANGKA TEORI

Representasi

Representasi berasal dari bahasa Inggris *representation* yang memiliki arti penggambaran. Menurut Stuart Hall (2013), representasi merupakan bahasa untuk menyampaikan pesan yang berarti atau memberikan penggambaran mengenai dunia kepada orang lain dan memiliki

keterkaitan dengan penggunaan bahasa, tanda, atau gambar. Dalam hal ini, representasi memberikan suatu pesan atau pandangan yang hendak disampaikan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa.

Stuart Hall membagi representasi ke dalam dua proses yaitu representasi mental dan representasi bahasa. Representasi mental merupakan konsep dimana indera manusia menangkap segala sesuatu yang bersifat abstrak dan menyimpannya ke dalam kepala atau pemikiran, sedangkan representasi bahasa merupakan konsep dimana bahasa berperan dalam proses konstruksi makna sehingga apa yang ada di dalam kepala atau pemikiran dapat diterjemahkan melalui bahasa supaya kita dapat menghubungkan konsep atau ide mengenai sesuatu dengan tanda dari simbol tertentu.

Stuart Hall mengatakan bahwa ada tiga pendekatan dalam proses representasi, yaitu pendekatan reflektif, pendekatan intensional, dan pendekatan konstruksionis.

1. Pendekatan Reflektif (*reflective*) merupakan pendekatan yang memiliki efek serupa dengan cermin yaitu menggambarkan makna yang sebenarnya terjadi di kehidupan dimana makna diproduksi oleh manusia melalui ide, objek, dan pengalaman nyata.

2. Pendekatan Intensional merupakan pendekatan dimana bahasa digunakan untuk mengkomunikasikan sesuatu sesuai dengan memperhatikan pemaknaan berdasarkan sudut pandang pribadi seseorang.
3. Pendekatan Konstruksionis merupakan pendekatan dengan menekankan proses konstruksi atau pembangunan makna dengan menghadapkan bahasa dengan hal lain sehingga tercipta interpretasi atau pemaknaan. Dalam tahap ini, manusia dapat melakukan seleksi dan menetapkan makna yang ada di dalam pesan atau karya yang ada.

Penggambaran realitas sosial melalui representasi tercipta dari pemikiran manusia yang kreatif dengan kekuatan konstruksi sosial di sekelilingnya. Realitas sosial menurut Berger dan Luckmann (dalam Bungin, 2007), yaitu sebuah proses dialektika yang berlangsung dalam proses simultan yang terdiri dari:

1. Eksternalisasi atau penyesuaian diri dengan lingkungan sosiokultural yang merupakan bagian dari hasil produk manusia.
2. Objektivasi merupakan interaksi sosial yang terjadi intersubjektif atau persetujuan realitas objek di masyarakat yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi;

3. Internalisasi merupakan proses identifikasi individu sebagai anggota dalam lembaga sosial atau organisasi sosial di lingkungan sekitarnya.

Teori Sudut Pandang

Teori sudut pandang atau *standpoint theory* berawal dari tahun 1807 ketika filsuf Jerman Georg Wilhelm Friedrich Hegel mendiskusikan adanya perbedaan sudut pandang mengenai hubungan tuan tanah dan budak yang memperlihatkan bahwa meskipun keduanya hidup dalam lingkungan yang sama, namun memiliki pengetahuan yang berbeda (Jayanti, 2011). Pandangan tersebut kemudian dibenarkan oleh Karl Marx karena posisi dari pekerja membentuk bagaimana mereka berpikir dan tingkat intelektualitas mereka yang berhubungan dengan kesempatan atau *privilege* yang didapatkan.

Nancy Hartsock kemudian mengembangkan teori sudut pandang tersebut pada tahun 1983 dengan mempublikasikan “The Feminist Standpoint : Developing the Ground for a Specially Feminist Historical Materialism” yang berisikan upaya Hartsock menghadirkan perempuan dalam teori Marx dengan mengaitkan semua aktivitas manusia. Pengetahuan, pengalaman, dan perilaku komunikasi manusia, baik perempuan dan laki-laki terbentuk berdasarkan tempat mereka berasal

sehingga teori sudut pandang ini melakukan advokasi kritis mengenai *status quo* karena struktur kekuasaan yang melakukan dominasi (West & Turner, 2010).

Dalam mengembangkan teori Marx, Hartsock (2019: 295) mengemukakan bahwa kelompok tertindas perlu terlibat dalam proses historis, politis, dan teoritis untuk membentuk pemahaman baru mengenai kehidupan sosial, diperlukan juga keyakinan dan pemahaman mengenai suatu pengetahuan, pengakuan bahwa aktivitas praktis sehari-hari mengandung pengetahuan, dan diperlukan kemampuan untuk mengenali dan menciptakan alternatif baru dalam menghadapi kesulitan karena kelas penguasa, ras, dan gender mengkonstruksikan dunia dengan hubungan material-sosial yang memaksa semua pihak berpartisipasi sehingga kelompok yang tertindas memerlukan pemahaman untuk mengungkap hal-hal yang tidak manusiawi.

Teori Film Feminis

Feminist film theory atau teori film feminis muncul pada awal tahun 1970-an untuk memahami sinema sebagai praktik budaya yang merepresentasikan dan mereproduksi mengenai perempuan dan feminitas (Smelik, 2019). Representasi dalam film bukan berarti hanya merekam realitas, namun juga mengkonstruksikan gambaran mengenai realitas menggunakan

kode, mitos, konvensi, atau tanda (Murray, 2019:14).

Representasi perempuan dalam film sendiri cenderung membentuk realitas perempuan secara bias dan konservatif karena film sebagai produk media berasal dari suatu budaya dan mencerminkan norma atau nilai dalam suatu budaya. Para pembuat film juga tidak dapat terhindar dari hubungan karya mereka dengan budaya sosial, politik, dan sejarah di mana mereka berada. Karya yang sudah ada mempengaruhi perkembangan karya baru melalui peniruan dan pengulangan unsur tertentu (Murray, 2019).

Kondisi sosial masyarakat yang masih melekat dengan budaya patriarki dan industri film yang didominasi laki-laki membuat peran perempuan dalam film seringkali hanya berfokus pada tampilan fisik dan bergantung dengan karakter laki-laki. Sementara itu, meskipun perempuan menjadi peran utama, perempuan seringkali diperlihatkan sebagai sosok yang kebingungan, membutuhkan bantuan, pasif, dan sebagai makhluk seksual (Smith, 2022).

Kehadiran kreator film perempuan meningkatkan kemungkinan akan meningkatnya kesetaraan gender dalam representasi film seperti yang dikatakan oleh pakar media feminis di mana diperlukan keterlibatan perempuan sebagai kreator, aktor, dan penonton perempuan

untuk melihat perbedaan representasi perempuan yang ada saat ini (Neroni, 2016:65).

Feminisme Liberal dan Kekuasaan Perempuan dalam Politik

Feminisme secara etimologis berasal dari kata *Femme* (woman) dan *isme* atau kepercayaan yang diartikan sebagai kepercayaan dalam memperjuangkan hak kaum perempuan. Feminisme terbentuk karena adanya kesadaran akan ketidakadilan dan penindasan yang dialami oleh perempuan, serta adanya keinginan perempuan untuk melawan penindasan tersebut. Definisi feminisme dapat berubah-ubah karena perbedaan pemahaman oleh para feminis yang disebabkan oleh perbedaan realitas secara historis, budaya, dan tingkat kesadaran persepsi dan perilaku di dalam lingkungannya.

Feminisme liberal menjadi salah satu aliran feminisme yang berorientasi pada keadilan dan kesetaraan hak perempuan yang berkembang dari abad ke-18 dan 19. John Stuart Mill dan Harriet Taylor mengklaim bahwa cara untuk memaksimalkan utilitas agregat atau kebahagiaan adalah memberikan izin kepada individu untuk mengejar keinginan mereka dan apabila masyarakat ingin mencapai kesetaraan atau keadilan gender, maka masyarakat harus memberikan perempuan hak politik dan peluang

ekonomi yang sama dengan apa yang dinikmati oleh laki-laki (Tong, 2018:16).

Pemenuhan hak politik perempuan dan keterlibatan perempuan secara aktif dalam bidang politik mendorong hasil kebijakan yang mempertimbangkan hak, kewajiban, dan potensi perempuan untuk mengurus dan mengelola kebutuhan hidup, seperti kesehatan reproduksi, kepedulian dan kesejahteraan sosial, serta perlindungan dari kekerasan yang seringkali menimpa perempuan. Perempuan yang identik dengan kepekaan dan urusan domestik rumah tangga, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat memiliki kesadaran, merasakan, dan memiliki pengalaman dalam bidang sosial, kesehatan, dan ekonomi di lingkungan masyarakat, seperti pentingnya pendidikan bagi anak, pemenuhan gizi, dan kenaikan harga bahan pangan.

Tidak hanya mewakili dan menghasilkan kebijakan yang menguntungkan perempuan saja, perempuan yang terlibat aktif secara umum dalam kegiatan politik juga berperan dalam mengatasi permasalahan sosial dan kesejahteraan di lingkungan masyarakat. Vicky Randall (dalam Pudji, 2008) mengindikasikan bahwa jika jumlah perempuan lebih banyak dalam proses pengambilan keputusan, maka fokus kehidupan politik juga akan berubah.

Perempuan dengan mengusung isu-isu politik yang *conventional*, seperti ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan kesejahteraan sosial membuat kehidupan berpolitik lebih bermoral dibandingkan dengan *hard politics* yang mengusung anggaran pembelian senjata, perang, dan sebagainya. Keterlibatan perempuan secara aktif dalam bidang politik ini membawa perempuan dalam predikat *agent of change* atau pembawa perubahan yang memiliki potensi besar membawa kehidupan bermasyarakat dan bernegara menjadi lebih baik.

Segala bentuk upaya yang dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi perempuan untuk merasakan kesetaraan gender dalam segala bidang kehidupan, termasuk di dalamnya bidang politik tentunya tidak hanya memerlukan kesadaran pada perempuan saja, namun juga memerlukan dukungan dari segala pihak sehingga kebijakan yang ada dalam dunia politik tidak lagi hanya berdasarkan pandangan dan kepentingan laki-laki saja, namun juga mewakili pandangan perempuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial.

Partisipasi Politik oleh Perempuan

Semua warga negara dapat berpartisipasi dalam bidang politik tanpa memandang ras, agama, suku, antar golongan, maupun gender. Dalam hal ini, perempuan juga dapat berpartisipasi secara

aktif terlibat dalam kegiatan berpolitik. Namun, menurut Lycette (dalam Parwati & Istiningdiah, 2021)terdapat empat kendala bagi perempuan dalam berpartisipasi dan terlibat pada kegiatan politik, antara lain:

1. Perempuan menjalankan dua peran sekaligus, yaitu peran reproduktif dan peran produktif, di dalam maupun di luar rumah;
2. Perempuan relatif memiliki pendidikan yang rendah dibanding dengan laki-laki karena perbedaan kesempatan yang diperoleh;
3. Adanya hambatan budaya yang terkait dengan pembagian kerja secara seksual dan pola interaksi perempuan dengan laki-laki yang membatasi gerak perempuan.
4. Adanya hambatan legal bagi perempuan, seperti larangan kepemilikan tanah, larangan berpartisipasi dalam pendidikan maupun program keluarga berencana.

Adapun berbagai kendala dan hambatan yang harus dialami perempuan yang terlibat dan berpartisipasi dalam politik sudah seharusnya dihilangkan karena sekarang ini banyak perempuan berprestasi yang terjun ke dalam ranah politik, antara lain Tri Rismaharini sebagai menteri sosial Republik Indonesia ini menjadi perempuan pertama yang berhasil menjabat sebagai walikota. Sosoknya yang tegas ini membawa Kota Surabaya meraih

piala Adipura Kencana delapan kali secara berturut-turut dari 2011 hingga 2018 untuk kategori kota metropolitan.

Keterlibatan dan keterwakilan perempuan secara aktif dalam bidang politik di Indonesia yang menuai banyak prestasi ini menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki potensi dan kemampuan dalam bidang politik. Bahkan, sejak orde baru telah dilaksanakan berbagai kebijakan untuk mendorong partisipasi aktif perempuan, seperti:

1. Menetapkan dan melaksanakan berbagai program pemberdayaan perempuan,
2. Menetapkan peraturan perundang-undangan yang berpihak pada perempuan,
3. Membentuk Kementerian Negara Urusan Peranan Wanita sejak orde baru yang masih eksis hingga hari ini dengan nama Kementerian Negara Pemberdayaan perempuan.
4. Mendirikan organisasi sebagai wadah perempuan berpartisipasi seperti PKK, Dharma Wanita, dan lainnya.

Keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam bidang politik ini menunjukkan bahwa penempatan perempuan dalam suatu posisi hierarki sosial dapat menjadi salah satu bentuk perlawanan terhadap penindasan ketidaksetaraan gender yang seringkali dialami perempuan dalam segala aspek

kehidupan. Tanpa adanya keterlibatan dan keterwakilan perempuan di bidang politik ini mengakibatkan adanya kecenderungan kebijakan yang hanya menempatkan kepentingan laki-laki dalam pengambilan kebijakan. Keterlibatan perempuan secara aktif mendorong hasil kebijakan yang mempertimbangkan hak, kewajiban, dan potensi perempuan untuk mengurus dan mengelola kebutuhan hidup, seperti kesehatan reproduksi, kepedulian dan kesejahteraan sosial, serta perlindungan dari kekerasan yang seringkali menimpa perempuan. Perempuan yang identik dengan kepekaan dan urusan domestik rumah tangga ini, baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki kesadaran, merasakan, dan memiliki pengalaman dalam bidang sosial, kesehatan, dan ekonomi di lingkungan masyarakat, seperti pentingnya pendidikan bagi anak, pemenuhan gizi, dan kenaikan harga bahan pangan. Tidak hanya mewakili dan menghasilkan kebijakan yang menguntungkan perempuan saja, perempuan yang terlibat aktif secara umum dalam kegiatan politik juga berperan dalam mengatasi permasalahan sosial dan kesejahteraan di lingkungan masyarakat.

Perempuan dengan mengusung isu-isu politik yang konvensional, seperti ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan kesejahteraan sosial membuat kehidupan berpolitik lebih bermoral dibandingkan dengan *hard*

politics yang mengusung anggaran pembelian senjata, perang, dan sebagainya. Keterlibatan perempuan secara aktif dalam bidang politik ini membawa perempuan dalam predikat *agent of change* atau pembawa perubahan yang memiliki potensi besar membawa kehidupan bermasyarakat dan bernegara menjadi lebih baik. Pentingnya peran perempuan dalam berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik di Indonesia menunjukkan bahwa diperlukan dukungan dari segala pihak sehingga kebijakan yang ada dalam dunia politik tidak lagi hanya berdasarkan pandangan dan kepentingan laki-laki saja, namun juga mewakili pandangan perempuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial.

Stereotip Perempuan dalam Politik

Stereotip berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata *stereos* atau padat-kaku dan *typos* yang artinya model. Samovar & Porter (dalam Lampe & Anriani, 2016) mendefinisikan stereotip sebagai persepsi atau kepercayaan yang dianut oleh kelompok atau individu berdasarkan pada pendapat atau sikap yang telah terbentuk sebelumnya. Selanjutnya, dikutip oleh Warnaen dari bukunya yang berjudul *Stereotip Etnis dalam Masyarakat Multietnis* (2002) dijelaskan bahwa Walter Lippmann mendefinisikan stereotip sebagai gambaran di kepala yang merupakan rekonstruksi dari keadaan yang sebenarnya.

Stereotip dianggap sebagai salah satu mekanisme yang disederhanakan untuk mengendalikan lingkungan yang luas, majemuk, dan bergerak terlalu cepat. Gambaran lingkungan yang terlalu cepat tersebut yang membentuk seseorang bertindak untuk melakukan pengenalan lingkungan berdasarkan gambaran pribadi dan gambaran dari orang lain.

Pengalaman pembentukan stereotip diperoleh melalui berbagai cara, antara lain pengalaman pribadi, pengalaman dari orang lain, dan pengalaman dari media massa.

1. Pengalaman pribadi diperoleh setelah berinteraksi dengan individu atau kelompok yang berbeda ras, etnik, agama, dan kelompok sosial yang berbeda.
2. Pengalaman dari orang lain yaitu pengalaman yang diperoleh dan dipelajari dari orang lain, seperti bahas, nilai, sikap, dan keyakinan dari orang lain yang memberikan informasi.
3. Pengalaman dari media massa yaitu pengalaman yang diperoleh melalui media yang memberikan gambaran mengenai suatu etnik tertentu.

Aspek-aspek stereotip menurut Hewstone & Brown (dalam Supartiningsih, 2012) yaitu kategorisasi, turun temurun, dan karakteristik. Kategorisasi merupakan kondisi dimana keberadaan individu dalam suatu kelompok diidentifikasi dengan pengelompokan kelompok tertentu

berdasarkan karakter atau sifat yang dimiliki. Kemudian, turun temurun merupakan sistem pembentuk stereotip yang didasarkan pada sifat dan perilaku individu yang membuat semua anggota menilai bahwa semua kelompok sama dengan individu tersebut. Selanjutnya, karakteristik merupakan sesuatu yang khas atau mencolok dari kebiasaan bertindak suatu kelompok yang digeneralisasi.

Adapun stereotip perempuan berpolitik ini dibagi oleh Dolan ke dalam tiga sudut pandang yang dilihat dari:

1. Pandangan bahwa perempuan tidak memiliki kapasitas untuk terlibat dalam kegiatan politik dan menjadi pemimpin karena tidak adanya pendidikan dan pengalaman yang dimiliki perempuan dalam bidang politik.
2. Pandangan bahwa perempuan memiliki karakteristik feminim mengedepankan perasaan yang tidak rasional dalam mengambil keputusan (*decision making*)
3. Pandangan bahwa perempuan tidak memiliki pengalaman dalam jabatan publik dan praktik dominasi budaya patriarki yang membuat tidak adanya minat perempuan untuk masuk ke dalam jabatan publik karena adanya pandangan bahwa politik ranah yang kotor dan taktik (Dolan, 2014).

Stereotip maskulinitas yang melemahkan perempuan untuk berpartisipasi dalam politik sudah seharusnya tidak lagi menjadi hambatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik karena kekuasaan perempuan (*women power*) mengintegrasikan kekuasaan yang dapat dicapai oleh laki-laki dan perempuan dengan adil. Keluwesan yang dimiliki perempuan dapat menjadikan perempuan politisi yang handal karena partisipasi politik dengan penerapan kekuasaan perempuan diarahkan pada agenda politik tanggap yang memperhatikan kebutuhan orang lain.

Maskulinitas Politik

Maskulinitas politik merupakan bentuk maskulinitas yang dikonstruksikan, dianggap keberadaannya, dan diklaim oleh pemain politik yaitu individu atau sekelompok orang yang terlibat dalam ranah politik sebagai politisi profesional, anggota partai, anggota militer, atau warga negara dan anggota gerakan politik yang mengklaim atau memperoleh hak politik (Starck & Luyt, 2019).

Teori maskulinitas sendiri diambil dari salah satu pemikiran Thomas Hobbes dan tokoh lain pada teori realisme yang memiliki pandangan maskulinitas dan sarat akan misoginis. Teori ini mengklarifikasi prajurit laki-laki dan merefleksikannya dalam perilaku negara pada saat itu di mana

kita seringkali melihat adanya negara yang menggunakan sifat-sifat maskulinitas yang dinilai ideal untuk menjustifikasi kepentingan nasional dan kebijakan terkait keamanan negara dengan kekerasan yang mengakibatkan munculnya masalah, seperti sosial ekonomi di negara lain terutama negara-negara yang terlibat dalam peperangan dan penyerangan militer seperti kemiskinan, ketidakstabilan politik, ekonomi, dan keamanan.

Maskulinitas politik dalam tingkat kolektif muncul dalam tiga bentuk: (i) meniru dan mengikuti kepemimpinan dengan maskulinitas; (ii) mengikuti budaya dan tradisi komunitas lokal atau organisasi politik secara personal atau interaksional sebagai anggota; (iii) internalisasi atau melawan stereotip media mengenai tindakan sosial gender tertentu (Ozbay & Soybakis, 2020),

Sifat kekerasan, keberanian, kekuasaan, kemandirian, dan kekuatan fisik sudah sangat lama mempengaruhi politik internasional dalam tatanan politik global yang diproyeksikan dalam tingkah laku atau kebijakan dalam pembuatan keputusan atau *decision making process* yang cenderung merefleksikan maskulinitas dengan instrumen kekerasan (Muryantini et al., 2020).

Maskulinitas politik terbagi menjadi beberapa potret, yakni melalui hegemoni

militer, superioritas ideologi ras maupun kebudayaan, bentuk perlawanan terhadap musuh, regulasi yang memproduksi ketidaksetaraan dan melanggengkan maskulinitas, serta kenangan kejayaan di masa lampau. Secara berbeda, Kuba mengartikulasikan maskulinitas melalui prioritas kebijakan yang bersifat feminin seperti sektor kesehatan dan pendidikan (Muryantini et al., 2020).

Pada umumnya laki-laki diberikan kekuasaan yang lebih besar daripada perempuan dan perempuan digambarkan sebagai makhluk yang lemah dan emosional dengan karakteristik privat. Dalam dunia internasional, kegiatan ekonomi politik dianggap hanya sebatas menunjukkan sisi maskulinitas yang didominasi laki-laki, sedangkan perempuan tidak memiliki kemampuan dalam membentuk atau mempengaruhi politik dan ekonomi internasional (Muryantini et al., 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan paradigma kritis untuk memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai bagaimana perempuan yang termarginalkan dalam bidang politik direpresentasikan dalam film *Tilik the Series* dengan penerapan praktik kekuasaan dan praktik ideologi maskulinitas politik dengan menggunakan sumber data primer

dari dialog tokoh, visualisasi, adegan, setting, dan bahasa verbal maupun nonverbal pada film *Tilik the Series*. Kemudian, data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari pustaka buku, jurnal, artikel, pemberitaan, dan penelitian lainnya.

Penelitian ini dalam menganalisis dan menginterpretasi data menggunakan metode analisis semiotika John Fiske yang terbagi dalam tiga tahap:

1. Tahap realitas yaitu proses penandaan realitas yang ada dalam adegan dengan kode-kode sosial yang berhubungan dengan lingkungan, pakaian, gerak tubuh, ekspresi, dan ucapan.
2. Tahap kedua yaitu representasi yang mencakup kode teknis mengenai kamera, *editing*, pencahayaan, musik. Tahap representasi ini juga memperhatikan kode konvensional yang terdiri dari konflik, karakter, pengaturan, dan pemilihan pemain.
3. Tahap ketiga yaitu ideologi merupakan hasil dari kedua tahap yang kemudian dikategorikan pada penerimaan dan hubungan sosial dengan kode ideologi, seperti ideologi patriarki, feminisme, dan kapitalisme.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan level realitas dan representasi dari 12 adegan film *Tilik the Series* (2023) yang telah dianalisis menggunakan teori semiotika *The Code of Television* John Fiske pada bab sebelumnya

terdapat pembentukan ideologi pada adegan-adegan tersebut yang merepresentasikan keterlibatan perempuan dalam politik yang berhubungan dengan modal politik, gaya kepemimpinan perempuan, dan stereotip perempuan berpolitik.

Modal Sosial sebagai Titik Tumpu

Perempuan Berpolitik



Gambar 1.2 Kunjungan Bu Lurah pada Program Kampanye Bu Tejo

Modal politik perempuan dalam film *Tilik the Series* menunjukkan bahwa perempuan yang terlibat dalam kegiatan politik lebih mengutamakan modal sosial dalam berpolitik. Modal sosial menurut Casey (2012) terdiri dari tiga cara yaitu dukungan dari kelompok kolektif, ikatan pribadi kelompok di luar partai politik, dan pengakuan dari tokoh yang memiliki peran penting. Bu Tejo dalam memenangkan kontestasi pemilihan Desa Karangwaru mengusung slogan *Digdaya lan Sembada* yang didasarkan pada pemikiran *pemberdayaan dan kemandirian* sebagai identitas kampanyenya yang diwujudkan melalui kerja sama antara Bu Tejo dengan komponen sumber daya manusia yaitu para

perempuan yang terlibat dalam pengelolaan kegiatan politiknya, seperti program kampanye pasar kreatif, pengembangan *online shop* UMKM desa, dan sosialisasi penggunaan internet untuk kebutuhan masyarakat.

Keterlibatan para perempuan sebagai modal sosial yang terdiri dari Bu Lurah dan Bu RT yang memiliki kedudukan tinggi di desa, ibu-ibu yang bergabung dalam UMKM desa, serta ibu-ibu rumah tangga untuk mendukung proses kampanye Bu Tejo menunjukkan bahwa perempuan berpolitik memiliki karakteristik kerja sama secara kolektif, suportif, dan menunjukkan adanya gerakan *women support women* dengan memberikan bantuan berupa tenaga dan pikiran untuk kegiatan kampanye Bu Tejo. Karakteristik tersebut juga disebut dengan karakteristik *communal* yang dilekatkan pada karakter perempuan di mana perempuan dalam lingkup organisasional dianggap berbicara secara tentative, peduli terhadap orang lain, menerima arahan, memberikan dukungan dan menenangkan orang lain, serta memberikan solusi pada permasalahan yang relasional maupun antar personal (Eagly et al., 2003).

Pemimpin laki-laki dalam film *Tilik the Series* ini digambarkan lebih mengutamakan modal ekonomi yang ilegal melalui politik *gentong babi*. Istilah “gentong babi” (*pork barrel*) mengacu pada

pengeluaran yang dikeluarkan oleh politisi sebagai imbalan dukungan politik berupa bantuan kampanye atau suara pada kontestasi pemilihan umum. Politik *gentong babi* ini merupakan perwujudan kegagalan pengelolaan dana pemilu yang bersih (Sahdan et al., 2019). Pak Hartono dalam hal ini menggunakan politik uang dengan melakukan peminjaman kepada Pak Minto untuk proses kampanye politiknya, membagikan sembako dan amplop berisi uang kepada warga, serta menyebarkan *serangan fajar* yang merupakan pembagian uang di pagi buta sebelum pencoblosan. Modal ekonomi illegal Pak Hartono terus berjalan karena terdapat dukungan Bawaslu yang seharusnya mengawasi dan memberikan sanksi kepada calon yang melangsungkan pelanggaran berpihak kepada Pak Hartono karena uang suap yang diberikannya.

Dominasi Gaya Kepemimpinan Maskulin pada Perempuan Berpolitik



Gambar 3.1 Bu Tejo Memarahi Para Rentenir yang Menyita Motor Pak Subari
Gaya kepemimpinan perempuan dalam berpolitik direpresentasikan pada Film *Tilik the Series* dengan didominasi

gaya maskulin dengan cara berbicara yang tegas dan agresif ketika menghadapi permasalahan ketidakadilan dan penyelewengan hukum oleh oknum tertentu. Laura L. Bierema (dalam Yani, 2018) menyebutkan bahwa pemimpin yang ideal direpresentasikan pada berbagai literatur sebagai individu yang memiliki kepribadian dapat bekerja dalam kebudayaan tertentu, namun tetap memiliki sifat maskulin. Adopsi sifat maskulin oleh perempuan berpolitik dalam Film *Tilik the Series* menunjukkan bahwa terdapat unsur komedi dengan gaya *screwball* yang menggambarkan perempuan sebagai sosok yang tidak sesuai pada kondisi umum yang melekat dengan sifat femininnya. Selain itu, pemimpin perempuan juga dianggap sebagai sesuatu yang janggal, meskipun mereka memiliki daya tarik tersendiri dalam dunia media dan akademis (Stead dan Elliott dalam Bierema, 2016:121).

Perempuan dalam genre komedi *screwball* menurut Majewska & Majewska (2024) cenderung terlibat dalam olok-olok verbal dan mengubah situasi yang seharusnya serius menjadi situasi komedi melalui interaksi perempuan dengan lingkungannya dengan cara yang tak terduga. Dalam hal ini Bu Tejo diperlihatkan memiliki sifat maskulinitas yang diiringi dengan cara berbicara yang *cerewet* dan tidak membuka peluang bagi lawannya yang merupakan laki-laki untuk

berbicara dan melakukan perlawanan untuk menambah kesan komedi. Namun, gaya perempuan maskulin ini juga menunjukkan adanya unsur pemberdayaan di mana perempuan memiliki kepedulian untuk aktif melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan hukum yang diperlihatkan melalui perlawanannya pada tukang parker yang mengubah tarif parkir tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Domestifikasi Perempuan Berpolitik



Gambar 1.3 Pak Tejo memarahi Bu Tejo karena tidak mempersiapkan keperluan pencalonan lurahnya dengan benar. Stereotip perempuan berpolitik memperlihatkan *domestifikasi perempuan* dengan pemikiran perempuan sebagai subordinasi hanya dapat berada pada ranah domestik saja. Para tokoh laki-laki dalam film *Tilik the Series* masih memiliki pemikiran bahwa perempuan memiliki kedudukan subordinasi dengan melanggengkan dan menyebarkan stereotip negatif perempuan bahwa perempuan dalam kegiatan berpolitik tidak memiliki kompetensi, jiwa kepemimpinan, dan sifat maskulinitas untuk mendukung kegiatan berpolitik (Schneider & Bos, 2014). Stereotip tersebut dilanggengkan melalui

tokoh Pak Hartono sebagai lawan politik Bu Tejo dan pendukungnya sebagai dengan menyebarkan stereotip bahwa laki-laki lebih cocok menjadi pemimpin karena memiliki sikap tegas dan kuat, sedangkan perempuan merupakan sosok yang lemah dan menghambat pembangunan desa. Pak Hartono dan pendukungnya juga menyebarkan informasi bohong mengenai Bu Tejo yang bercerai dengan Pak Tejo dan menjadi *janda* dalam konotasi negatif sehingga membuat masyarakat dengan budaya patriarki yang masih melekat tersebut berpikiran bahwa Bu Tejo tidak memiliki kompetensi dalam ranah politik karena tidak dapat mengatur ranah privatnya sebagai seorang istri. Hal ini dikarenakan perempuan dalam masyarakat Jawa tradisional dikaitkan dengan urusan privat untuk tetap setia kepada suaminya dan mengurus rumah tangga (Lorber & Moore 2011).

Pak Tejo sebagai suami Bu Tejo juga menganggap Bu Tejo sebagai isterinya harus tunduk kepadanya dan memenuhi kebutuhannya, termasuk kebutuhan politik. Pak Tejo sering memarahi Bu Tejo karena dianggap tidak memiliki kompetensi dalam mempersiapkan pencalonan lurahnya, padahal Bu Tejo telah mencoba mendekati tokoh-tokoh penting dan mempersiapkan berkas untuk membantu pencalonan lurah Pak Tejo, sedangkan Pak Tejo hanya berfokus pada cara pengumpulan uang

untuk pencalonan dirinya. Selain Bu Tejo diperlihatkan gagal sebagai isteri, Bu Tejo juga diperlihatkan sebagai sosok yang kurang memperhatikan anak-anaknya ketika terlibat dalam politik yang diperlihatkan melalui adegan Arka, anak Bu Tejo yang hilang ketika Bu Tejo berfokus pada pencalonan lurahnya.

KESIMPULAN

Hasil penelitian representasi perempuan dalam film *Tilik the Series* didapatkan melalui proses analisis 12 adegan film *Tilik the Series* yang telah dipilih sebelumnya berdasarkan modal politik, gaya kepemimpinan, dan stereotip perempuan berpolitik dengan menggunakan semiotika *The Codes of Television* oleh *John Fiske* untuk menggambarkan representasi perempuan berpolitik sesuai dengan perumusan masalah yang mempertanyakan representasi bentuk kekuasaan perempuan berpolitik pada film *Tilik the Series* dan keberadaan praktik ideologi maskulinitas politik, perbedaan gaya laki-laki dan perempuan dalam berpolitik, serta posisi film *Tilik the Series* dalam merepresentasikan perempuan berpolitik.

1. Modal yang digunakan perempuan untuk terlibat dalam kegiatan politik yaitu modal sosial sebagai modal utama dalam kegiatan politik perempuan karena keseluruhan modal membutuhkan hubungan sosial dalam

mewujudkan tujuan kegiatan politik melalui bentuk *pemberdayaan* dan *kemandirian* perempuan.

2. Gaya kepemimpinan perempuan yang mengadopsi gaya maskulin memiliki unsur komedi *screwball* yang menjadikan perempuan digambarkan sebagai sosok yang tidak sesuai dengan sifat feminin yang dilekatkan pada perempuan.
3. Stereotip perempuan berpolitik berdasarkan Schneider dan Bos (2014) dalam film *Tilik the Series* yaitu adanya *domestifikasi perempuan* sebagai subordinasi yang tidak memiliki kemampuan dan sifat yang diperlukan dalam ranah politik.

Berdasarkan aspek-aspek tersebut pada film *Tilik the Series* memperlihatkan bahwa terdapat bentuk kekuasaan perempuan yang mengadopsi praktik ideologi maskulinitas politik melalui penggunaan gaya kepemimpinan maskulinitas oleh perempuan yang terlibat dalam kegiatan politik melalui penggambaran atau tindakan yang dilakukan oleh perempuan itu sendiri.

Perbedaan laki-laki dan perempuan dalam keterlibatannya pada bidang politik terlihat dari aspek modal politik dan gaya kepemimpinan yang terlihat dari tokoh Pak Hartono yang menggunakan modal ekonomi politik uang sebelum pencoblosan dan gaya kepemimpinan maskulin yang

berfokus pada pemberian kebutuhan finansial warga untuk mencari dukungan, sedangkan Bu Tejo menggunakan beragam modal dengan mengutamakan modal sosial dan gaya kepemimpinan yang berfokus pada pemberdayaan, kesetaraan, dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun posisi film *Tilik the Series* yang diproduksi oleh perempuan menunjukkan adanya penggambaran perempuan yang berdaya dan memiliki kekuatan tidak kalah dengan pemimpin laki-laki berdasarkan sudut pandang perempuan itu sendiri dan pengalaman yang dialami perempuan sesuai dengan *standpoint theory* dan *feminist film theory*, namun film ini juga memperlihatkan bahwa perempuan masih dibatasi dalam stereotip perempuan yang ditunjukkan pada beberapa adegan.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, W. J., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. In *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Dayanti, L. D. (2011). Wacana Kekerasan dan Resistensi Perempuan dalam Film Karya Sutradara Perempuan. *Jurnal Kawistara*.
<https://doi.org/10.22146/kawistara.3912>
- Dolan, K. (2014). Gender Stereotypes, Candidate Evaluations, and Voting for Women Candidates: What Really Matters? *Political Research Quarterly*.
<https://doi.org/10.1177/1065912913487949>
- Eagly, A. H., & Carli, L. L. (2003). The female leadership advantage: An evaluation of the evidence. *Leadership Quarterly*.
<https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2003.09.004>
- Eagly, A. H., Johannesen-Schmidt, M. C., & Van Engen, M. L. (2003). Transformational, Transactional, and Laissez-Faire Leadership Styles: A Meta-Analysis Comparing Women and Men. In *Psychological Bulletin*.
<https://doi.org/10.1037/0033-2909.129.4.569>
- Gita Murniasih, Diah Handayani, & Taufik Alamin. (2018). Proses Domestifikasi Perempuan dalam Budaya Arab (Analisis Framing Model Zhongdang Pan Dan Gerald M. Kosicki Dalam Film Wadjda). *Mediakita*.
<https://doi.org/10.30762/mediakita.v2i1.978>
- Hall, S. (2013). Representation: Cultural Representation and Signifying Practices. *The Open University*.
- Hartsock, N. C. M. (2019). The feminist standpoint revisited and other essays. In *The Feminist Standpoint Revisited, and other Essays*.
<https://doi.org/10.4324/9780429310881>
- Jayanti. (2011). Konsep Peran dan Posisi Public Relation Dalam Perspektif Gender (Studi Kasus Pada Praktisi PRPT Astra International Tbk). *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Lampe, I., & Anriani, H. B. (2016). Stereotipe, Prasangka dan Dinamika Antaretnik. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*.
<https://doi.org/10.46426/jp2kp.v20i1.42>
- Majewska, M., & Majewska, M. (2024). *Screwball Comedy Quick-Witted Eccentrics: The Genre and Genders of Screwball Comedy*. September, 0–11. <https://doi.org/10.4000/12avh>
- Murray, T. (2019). Studying Feminist Film Theory. In *Studying Feminist Film Theory*.
<https://doi.org/10.3828/liverpool/9781911325802.001.0001>
- Muryantini, S. R. I., Rahatmawati, I., &

- Hanifah, L. (2020). *Maskulinitas Politik Global*. <https://eprints.upnyk.ac.id/34623/1/1>. Buku Maskulinitas Politik Global_UNESCO.pdf
- Neroni, H. (2016). Feminist Film Theory and Cléo from 5 to 7. In *Feminist Film Theory and Cléo from 5 to 7*. <https://doi.org/10.5040/9781501313721>
- Ozbay, C., & Soybakis, O. (2020). Political Masculinities: Gender, Power, and Change in Turkey. *Social Politics*. <https://doi.org/10.1093/jxy/jxy040>
- Parwati, T., & Istiningdiah, K. (2021). Partisipasi Dan Komunikasi Politik Perempuan Di Legislatif Menurut Kacamata Politisi Perempuan Di Indonesia. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*. <https://doi.org/10.14710/interaksi.9.2.119-129>
- Pudji, T. M. (2008). Citra Perempuan Dalam Politik. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v3i1.183>
- Sahdan, G., Tjandra, W. R., Disyacitta, F., Samaloisa, R., Abisono, F. G., Tjahjoko, G. T., Pramono, S. A., Setiyaningsih, Y., Agustino, L., Haboddin, M., Rozuli, A. I., & Siddha, A. (2019). Membongkar Mafia dan Oligarki Dalam Pemilu 2019. In *The Indonesian Power for Democracy (IPD)*.
- Schneider, M. C., & Bos, A. L. (2014). Measuring stereotypes of female politicians. *Political Psychology*. <https://doi.org/10.1111/pops.12040>
- Smelik, A. (2019). FEMINIST FILM THEORY. In *The Cinema Book, Third Edition*. <https://doi.org/10.2307/j.ctv36xw41t.24>
- Smith, S. (2022). 1. 'The Image of Women in Film: Some Suggestions for Future Research.' In *Feminist Film Theory*. <https://doi.org/10.1515/9781474473224-003>
- Starck, K., & Luyt, R. (2019). Political Masculinities, Crisis Tendencies, and Social Transition: Toward an Understanding of Change. In *Men and Masculinities*. <https://doi.org/10.1177/1097184X18782730>
- Supartiningsih. (2012). Multikulturalisme Dalam Perspektif Etika Diskursus Jürgen Habermas. *Prosiding Seminar Internasional Multikultural & Globalisasi*.
- Tong, R. (2018). Feminist thought: A more comprehensive introduction. In *Feminist Thought, Student Economy Edition: A More Comprehensive Introduction*. <https://doi.org/10.4324/9780429493836>
- West, R., & Turner, L. H. (2010). Introducing Communication Theory, Analysis and application fourth edition. In *McGraw-Hill Higher Education*.
- Yani, A. Z. (2018). Representasi Perempuan Pemimpin Melalui Tokoh Jules Ostin dalam Film The Intern. *Journal University Air Langga Library*.
- World Economic Forum. (2024). Insight Report. In *World Economic Forum* (Issue June). https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2024.pdf